
**Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Koordinasi
antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Provinsi*****Utilization of Information and Communication Technology in Coordination
Between the National Library with the Provincial Library*****Dimas A. Gammayani¹, Irham Hanif Nabawi, Muhammad Irsyad Alfatih
Mahasiswa Program Magister Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia****Abstrak**

Perubahan yang terjadi di dunia ini sedemikian pesat terutama perkembangan di bidang Teknologi informasi dan komunikasi Manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan cepat agar tidak tertinggal. Perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan kepada manusia dalam bekerja. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dapat efektif dan efisien. Perpustakaan Nasional RI diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 sebagai pembina terhadap segala jenis perpustakaan di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pembinaan Perpustakaan Nasional harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah diantaranya pemerintah provinsi yang diwakili oleh perpustakaan provinsi yang dapat dikatakan mewakili pemerintah provinsi dalam urusan perpustakaan. Perpustakaan Nasional RI dalam berkoordinasi dengan perpustakaan provinsi telah difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi berupa telepon, faksimili dan internet. Selain itu koordinasi juga dapat dilakukan dengan surat menyurat konvensional maupun tatap muka secara langsung. Penelitian ini ditujukan cara apa yang lebih umum digunakan oleh perpustakaan nasional RI dalam melakukan koordinasi dengan perpustakaan provinsi dan hal-hal yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan partisipatif, yakni peneliti dengan yang diteliti memiliki kesetaraan dan saling bekerjasama. Dari penelitian ini dapat diketahui koordinasi secara tatap muka langsung lebih disukai karena terhadap manfaat secara ekonomi maupun social yang dirasakan langsung oleh pelaku koordinasi. Pada penelitian ini dapat ditemukan bahwa koordinasi secara tatap muka langsung lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dimiliki. Melalui tatap muka langsung pelaku koordinasi merasakan manfaat secara langsung baik secara sosial maupun ekonomi yang hal tersebut tidak ditemukan jika koordinasi dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci: perpustakaan, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, pemanfaatan teknologi.

¹Korespondensi: Dimas A. Gammayani. Universitas Indonesia. Jalan Salemba Raya nomor 4, Jakarta. Telepon: (021) 7867222. Email: mymargaret51@yahoo.com

Abstract

Changes are rapidly occur in this world, especially developments in the field of information and communication technology. Man must be able to adjust quickly to keep up. Developments in information and communication technology has made it easier for people in work. Utilization of information and communication technology are expected to make work performed by humans is more effective and efficient. National Library of Indonesia mandated by Law No. 43 of 2007 as an adviser to all types of libraries throughout Indonesia. In carrying out the task, the National Library should coordinate with local government including the provincial government, represented by the provincial library which can be said to represent the provincial government in the affairs of the library. National Library of Indonesia in coordination with the provincial library has been facilitated by information and communication technology such as telephone, fax and internet. In addition, coordination can also be done through conventional correspondence or direct face to face. This study tried to define which communication system that is commonly used by the National Library of Indonesia when coordinating with the provincial library and the reasons that lie behind them. The method used in this research is descriptive with a participatory approach, the researchers and respondents are equal and shared a mutual cooperation. This research indicates that face-to-face coordination is more preferred, because face-to-face coordination offers a social and economical benefit.

Keywords: library, national library, provincial library, utilization technology

Dunia pada masa ini telah berkembang pesat. Jika pada masa lalu masyarakat bergantung pada industri namun sekarang masyarakat juga dipengaruhi oleh informasi. Pengaruh informasi dalam masyarakat ini memunculkan masyarakat baru yang disebut masyarakat informasi. Saat ini ada bermacam-macam konsep yang dapat digunakan untuk masyarakat informasi. Konsep ini telah digunakan sebagai sebuah konsep sosial, budaya, ekonomidan teknis. Masyarakat informasi adalah sebuah masyarakat yang terbentuk pasca revolusi industry. Masyarakat informasi sendiri dapat dikatakan sebuah masyarakat yang melambangkan perubahan yang dibawa olehkemajuan teknologi dan globalisasi menjelang akhir abad ke-20 zaman ini ditandai dengan kecepatan dan ketepatan dalam produksi, transfer, akses, dan penggunaan pengetahuan. Istilah masyarakat informasi sudah semakin familiar saat ini, bukan istilah produksi atau masyarakat konsumsi tidak lain karena masyarakat mulai merasakan pentingnya dan perlunya informasi dalam lingkungan yang dinamis saat ini.

Teknologi Informasi telah menyebar dengan cepat dinegara-negara maju tetapi umumnya lambat di Negara berkembang. Pengembangan teknologi informasi membutuhkan persiapan, terutama dalam bentuk investasi di bidang infrastruktur jaringan, keterampilan dan kerangka regulasi. Jadi infrastruktur fisik sistem informasi merupakan salah satu komponen penting dari masyarakat informasi. Teknologi pertama yang berperan dalam membentuk masyarakat informasi adalah penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Penemuan mesin cetak ini memungkinkan terjadinya pendokumentasian berbagai informasi yang beredar di masyarakat pada saat itu.

Penemuan mesin cetak ini juga memungkinkan informasi yang telah didokumentasikan tersebut untuk diduplikasikan sehingga dapat diketahui banyak orang sehingga informasi tidak lagi hanya diketahui orang-orang tertentu yang memiliki akses kepada sumber primer informasi. Penemuan mesin cetak ini sukses merevolusi cara penyebaran informasi yang pada masa awal dalam bentuk lisan menjadi bentuk tercetak.(Yeoman, 2006).

Revolusi industry juga turut berperan dalam membentuk masyarakat informasi. Revolusi industry merupakan sebuah lompatan besar bagi perkembangan teknologi. Revolusi industry sukses mengakselerasi proses kerja sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar. Pada masa ini mulai dikenal alat transportasi modern dimana manusia dapat berpindah lokasi dengan lebih cepat dan jauh dengan jumlah lebih banyak dari sebelumnya sehingga membuat penyebaran informasi menjadi lebih luas lagi dengan membawa volume informasi yang lebih banyak. Akselerasi peyebaran informasi pada masa itu turut berpengaruh pada perkembangan pola pikir masyarakat pada masa itu. Sehingga pasca revolusi industry adalah sebuah keadaan lahirnya tatanan masyarakat baru dimana pekerja ahli tumbuh pesat melampaui jumlah para buruh. Pertumbuhan para pekerja ahli ini melahirkan kesadaran baru bahwa informasi juga dibutuhkan untuk bekerja.

Teknologi komunikasi menjadi teknologi yang paling cepat berkembang dan memiliki peran yang paling vital terhadap masyarakat informasi. Diawali dari penemuan telegraf dimana informasi dapat disebarluaskan dengan cepat namun dengan jarak dan volume yang terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan penemuan radio dimana informasi untuk pertama kalinya dapat disebarluaskan secara real time namun masih terbatas jarak hingga penemuan telepon dimana paradigma komunikasi jarak jauh yang pada masa awal perkembangan teknologi komunikasi masih hanya bersifat satu arah berubah drastis menjadi komunikasi dua arah sehingga memungkinkan dua orang dapat bertukar informasi di saat yang sama. Teknologi internet adalah tingkat lebih lanjut dari teknologi komunikasi. Internet muncul disaat mulai mapannya perkembangan teknologi informasi. Awalnya teknologi internet ini dipersiapkan untuk menghadapi perang dunia ketiga. Teknologi internet dikembangkan oleh departemen pertahanan amerika serikat sebagai bentuk lanjut alat komunikasi di medan perang. Pada masa awal perkembangan internet hanya baru bisa menghubungkan puluhan komputer dan hanya terbatas di lingkungan departemen pertahanan Amerika Serikat. Memasuki awal tahun 1990-an merupakan masa bersejarah internet dunia. Pada masa itu mulai dirintis internet untuk digunakan oleh masyarakat sipil. Hingga pada tahun 1992 sudah ada sekitar satu juta unit komputer yang terhubung di seluruh dunia dengan lebih dari tiga ribu situs internet.

Informasi telah menjadi elemen penting yang tanpanya masyarakat tidak dapat mencapai tujuannya. Munculnya teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besarpada perkembangan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, pembelajaran dan penelitian. Teknologi informasi juga turut membentuk masa depan kita dan membuat kita beradaptasi dengan perubahan secara progresif. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Era literasi Digital meliputi sejumlah bidang: literasi dasar (bahasa), literasi sains (konsep-konsep ilmiah dan proses pengambilan keputusan), literasi ekonomi (mengidentifikasi masalah ekonomi, melakukan cost-benefit-analisis), literasi teknologi (apa dan

bagaimana karya teknologi dan untuk menggunakannya secara efektif), literasi visual (kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan dan menghargai visual), literasi informasi (mendefinisikan, mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi), literasi multikultural (memahami dan menghargai persamaan dan perbedaan antara budaya, nilai-nilai, keyakinan), dan literasi global (hubungan timbal balik antara organisasi internasional, publik dan entitas ekonomi swasta, dan individu di seluruh dunia) (Duff, 2002).

Munculnya teknologi informasi dan komunikasi telah secara dramatis mengubah cara dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi dan kemajuan dalam telekomunikasi telah merevolusi masyarakat informasi di seluruh dunia. Akses terhadap informasi, melalui internet, sekarang ada dimana-mana. Teknik-teknik baru telah memfasilitasi transformasi data, informasi dan pengetahuan dengan cepat ke dalam bentuk digital, sementara lompatan dalam pengembangan perangkat lunak telah membantu penyediaan metode baru yang kuat dari manajemen pengetahuan. Akibatnya, telah terjadi perubahan signifikan dalam cara di mana dokumen dan informasi adalah input, disimpan, terorganisir, diakses dan diambil. Pertumbuhan informasi digital didorong oleh kemudahan penerbitan, ditambah dengan harapan pengguna yang sangat tinggi menimbulkan tantangan yang signifikan untuk para pekerja pada masa ini.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perpustakaan Nasional) sebagai sebuah institusi yang beraktivitas di masa ini tentu dipengaruhi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di atas. Perpustakaan mempunyai tugas untuk membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan di Indonesia dan juga melestarikan bahan perpustakaan sebagai hasil budaya bangsa. Disamping itu tugas Perpustakaan Nasional adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Perpustakaan Nasional mempunyai fungsi antara lain: Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang perpustakaan; Melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang perpustakaan. Dari tugas dan fungsi ini sudah jelas bahwa Perpustakaan Nasional mengemban tugas yang sangat strategis dalam bidang perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan Nasional menjadi instansi kunci bagi maju mundurnya perpustakaan di Indonesia. Untuk pembinaan perpustakaan umum menjadi tugas pokok dan fungsi dari bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus. Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas Perpustakaan Nasional melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus menghadapi tantangan yang berat. Tantangan itu antara lain luasnya Negara Indonesia dengan bermacam suku bangsa dengan karakter bervariasi serta infrastruktur yang tidak merata.

Dalam tulisan ini penulis ingin mengungkap bagaimana salah satu unit kerja di perpustakaan yang memiliki tugas membina seluruh perpustakaan umum di Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan koordinasi terkait dengan tugasnya dalam membina perpustakaan umum di Indonesia yang melibatkan Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan partisipatif, yakni peneliti dengan yang diteliti memiliki kesetaraan dan saling bekerjasama. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai orang atau obyek yang diteliti. Secara *harfiah*, partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan". Metode partisipatif adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Responden di sini adalah seluruh staf dan pimpinan yang berada di unit kerja tersebut yang mana terdapat tujuh belas orang staf dan satu pimpinan unit kerja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti menjadi bagian dari unit kerja tersebut dan turut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja tersebut.

Hasil

Perpusnas adalah Lembaga Pemerintah Non Deoartemen. Perpusnas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Perpusnas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpusnas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Perpusnas menyelenggarakan fungsi: (1) Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional dibidang perpustakaan; (2) mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpusnas; (3) Melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi Pemerintah dibidang perpustakaan; (4) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Wewenang: Dalam menyelenggarakan fungsinya Perpusnas mempunyai kewenangan: (1) menyusun rencana nasional secara makro, dibidang perpustakaan; (2) Merumuskan kebijakan dibidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan secara makro; (3) Menetapkan sistem informasi dibidang perpustakaan; (4) Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang perpustakaan; (b) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

Perpusnas oleh undang-undang nomor 43 tahun 2007 diberi tugas untuk membina semua jenis perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan umum sebagai salah satu jenis perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh

masyarakat. Dimana dalam penyelenggaraan perpustakaan umum oleh konstitusi diamanahkan untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi. Penyelenggaraan perpustakaan umum di daerah diperkuat lagi oleh PP No. 38 th. 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menyatakan perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu berkoordinasi adalah hal yang harus dilakukan antara Perpusnas sebagai instansi Pembina dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara perpustakaan umum di daerah. Koordinasi ini dibutuhkan untuk menyinergikan arah pengembangan perpustakaan umum di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki 34 Provinsi dengan 33 Provinsi diantara telah memiliki Perpustakaan Provinsi. Satu Provinsi yang belum memiliki perpustakaan adalah Provinsi Kalimantan Utara yang baru saja berdiri. Perpustakaan Provinsi tersebut berkedudukan di Ibukota masing- masing provinsi.

Untuk penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di perpusnas telah tersedia fasilitas telepon, fax dan internet. Untuk telepon dan fax telah tersedia *direct line* ke masing-masing eselon III. Untuk akses internet telah tersedia di setiap *workstation* masing-masing staf. Namun tidak semua staff memiliki fasilitas kerja berupa komputer. Menurut data dari Biro bertanggungjawab terhadap inventaris kantor Perpusnas sebenarnya memiliki surplus jumlah komputer yang berarti jumlah komputer lebih banyak dari pada jumlah staf yang ada tapi pada kenyataannya di Bidang yang menangani pengembangan perpustakaan umum terdapat empat orang yang tidak memiliki fasilitas komputer dalam bekerja. Bidang ini juga tidak memiliki web dan email resmi dalam menjalankan tugasnya. Aktivitas email untuk kepentingan masih dilakukan melalui email pribadi masing-masing staf dan pimpinan walau sebenarnya perpusnas telah menyediakan domain @pnri.go.id bagi siapa saja yang membutuhkannya untuk keperluan dinas. Ketiadaan email resmi ini disebabkan keengganan dari pimpinan untuk mengajukan permohonan resmi kepada bidang lain sebagai pengelola domain @pnri.go.id dan juga ada anggapan bahwa fitur terbatas pada @pnri.go.id tidak seperti penyedia jasa email arus utama yang sudah umum digunakan. Untuk Perpustakaan provinsi seluruhnya telah memiliki fasilitas telepon dan faksimili yang dapat dihubungi.

Seluruh perpustakaan provinsi telah memiliki fasilitas internet dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Untuk email resmi hanya 23 Perpustakaan provinsi yang memiliki email resmi dengan dua perpustakaan provinsi memiliki dua email resmi (<http://pemetaan.pnri.go.id/direktori/umum>). Dari 23 email tersebut setelah dilakukan tes kontak terdapat empat alamat email yang gagal terkirim dan hanya tiga alamat email yang membalas email tes kontak tersebut. Untuk berkoordinasi dengan perpustakaan provinsi selama ini memanfaatkan fasilitas telepon dan faksimili. Koordinasi yang dilakukan melalui telepon dan faksimili hanya berupa koordinasi awalan berupa pemberitahuan atau undangan. Untuk penggunaan email biasanya baru dapat dilakukan setelah berkoordinasi terlebih dahulu melalui telepon bahwa akan menggunakan email. Dari hal tersebut dapat dipahami mengapa hanya dua alamat email yang menanggapi tes kontak yang telah dilakukan sebelumnya. Jika ingin menyampaikan informasi melalui email maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ukuran lampiran yang tidak terlalu besar dan menggunakan

format yang umum digunakan hal ini dikarenakan keterbatasan bandwidth pada akses internet dan fitur pada komputer di beberapa perpustakaan provinsi.

Walau sudah menggunakan peralatan komunikasi seperti telepon, faksimili dan Internet namun seringkali untuk undangan atau pemberitahuan ke provinsi perpustakaan harus tetap mengirim surat resmi tercetak melalui pos. Hal ini terjadi karena masih ada provinsi yang baru akan menindaklanjuti undangan dan pemberitahuan tersebut setelah menerima surat yang terdapat stempel basah dari instansi pengirim. Untuk koordinasi awal tidak jarang juga dilakukan melalui SMS atau telepon seluler antar pihak yang berkaitan untuk memangkas birokrasi. Untuk koordinasi lanjutan lebih dipilih komunikasi dengan tatap muka langsung. Tatap muka langsung berupa kunjungan baik dari perpustakaan ke perpustakaan provinsi atau dari perpustakaan provinsi ke perpustakaan. Koordinasi lanjutan ini meliputi perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pemutakhiran data, survey lapangan dan sebagainya.

Koordinasi secara tatap muka langsung lebih disukai untuk meminimalisir sekat-sekat birokrasi antara perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi yang sudah tidak memiliki hubungan hierarki lagi. Dengan tatap muka langsung diharapkan juga tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam berbagi informasi dalam koordinasi. Diharapkan juga dengan saling mengunjungi dapat meningkatkan kerjasama dan sinergisitas antara perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi. Komunikasi dengan tatap muka langsung sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena dapat menggunakan kelima alat indra untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang dikomunikasikan. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, koordinasi dengan tatap muka langsung berperan penting sampai kapan pun, selama manusia masih memiliki emosi. Adapun fungsi dari komunikasi dengan tatap muka langsung adalah berusaha meningkatkan hubungan insani (*human relation*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Walau pada pelaksanaannya hal-hal yang disampaikan dan didapat melalui hal tersebut bisa didapat dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada seperti telepon, faksimili dan koneksi internet atau bahkan cukup dengan berkirim dokumen melalui pos.

Ada hal-hal lain selain dari hal-hal tersebut diatas yang membuat koordinasi secara tatap muka lebih disenangi. Terdapat manfaat ekonomi dan sosial yang didapat oleh orang-orang yang melakukan koordinasi secara tatap muka langsung tersebut. Dengan lebih dipilihnya koordinasi secara tatap muka langsung maka pelaku koordinasi yang ditunjuk oleh pimpinan di atasnya akan diberikan perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi tersebut, baik dari perpustakaan ke perpustakaan provinsi atau dari perpustakaan provinsi ke perpustakaan. Karena di dalam perjalanan dinas terdapat komponen uang saku harian yang secara langsung diterima dan menjadi tambahan penghasilan bagi pelaksana koordinasi tersebut. Karena terdapat manfaat ekonomi pada hal tersebut maka tidak jarang jika perpustakaan provinsi masih memiliki anggaran perjalanan dinas namun tidak mendapat izin dari kepala daerah maka perpustakaan provinsi meminta kepada perpustakaan untuk mengundang perpustakaan provinsi untuk hadir di perpustakaan walau sebenarnya sedang tidak ada agenda resmi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan dinas dari kepala daerahnya. Manfaat ekonomi lain adalah jika perjalanan dinas ini

dilakukan dari Provinsi ke Jakarta maka tidak jarang mereka pulang dengan membawa barang belanjaan yang cukup banyak biasanya berupa pakaian yang dibeli di pusat grosir yang ada di Jakarta untuk nanti dijual lagi di daerah asalnya dengan harga yang lebih tinggi.

Koordinasi antara Perpustakaan dan Perpustakaan provinsi dengan cara tatap muka langsung lebih disukai dibandingkan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan. Melakukan koordinasi secara tatap muka langsung sudah menjadi mentalite di antara pegawai negeri sipil terutama yang ditugaskan melakukan koordinasi antara perpustakaan nasional dengan perpustakaan provinsi. Hal ini didasari dengan adanya motif ekonomi dan sosial pada pelaksanaan koordinasi melalui tatap muka langsung. Munculnya motif ekonomi ini karena perjalanan dinas sudah sejak lama dijadikan cara oleh para pegawai negeri sipil di Perpustakaan maupun Perpustakaan Provinsi untuk dijadikan penghasilan tambahan. Perjalanan dinas sebagai penghasilan tambahan pegawai negeri sipil muncul karena dimasa lalu para pegawai negeri sipil memiliki penghasilan melalui gaji yang minim bahkan kurang. Sehingga oleh para pegawai negeri sipil perjalanan dinas ini dijadikan cara untuk menambah penghasilan mereka dengan cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut para pegawai negeri sipil cara menambah penghasilan melalui perjalanan dinas adalah cara terbaik dibandingkan harus melakukan korupsi, pungutan liar atau hal tercela lainnya.

Selain manfaat ekonomi juga terdapat manfaat social yang dirasakan oleh pelaksana. Manfaat social tersebut adalah terdapat kebanggaan ketika melakukan perjalanan dinas ke daerah lain yang diikuti naiknya prestise seseorang dilingkungkannya ketika melakukan perjalanan dinas. Manfaat sosial lainnya adalah kesempatan mengunjungi daerah lain ketika perjalanan dinas dijadikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan kerabat yang kebetulan ada di daerah tujuan perjalanan dinas. Keinginan untuk mengaktualisasi diri ada pada diri kita masing-masing, bahwa motivasi atau dorongan terhadap aktualisasi diri itu adalah bawaan, bahwa setiap kita masing-masing mempunyai suatu keinginan yang inheren, yang kita bawa bersama lahir, yaitu berada demi keberadaan itu, berbuat demi perbuatan itu, merasa demi perasaan itu, yaitu aktualisasi diri. Hal ini diperkuat dengan mentalite yang ada di lingkungan pegawai negeri sipil bahwa melakukan perjalanan dinas merupakan kegiatan yang istimewa yang tidak semua pegawai negeri sipil dapat merasakannya sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas. Ibarat sebuah prestasi maka hal tersebut perlu dipublikasikan sehingga semakin banyak khalayak yang mengetahui bahwa yang bersangkutan diperintahkan melakukan perjalanan dinas.

Manfaat sosial lainnya adalah kesempatan mengunjungi daerah lain ketika perjalanan dinas dijadikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan kerabat yang kebetulan ada di daerah tujuan perjalanan dinas. Hal ini sejalan dengan mentalite bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Dengan kentalnya hubungan kekerabatan maka menjadi hal yang penting untuk saling mengunjungi untuk saling menjaga hubungan baik. Namun terkadang hal itu terkendala dengan jarak dan dana. Oleh karena itu ada sebagian orang yang menjadikan perjalanan dinas ini sebuah kesempatan untuk menjaga hubungan

kekerabatan itu ketika ditugaskan ke daerah yang disana terdapat kerabat mereka di sana.

Simpulan

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sudah difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni untuk menunjang kinerjanya dan juga telah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoperasikannya. Teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak dimaksimalkan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi dalam pelaksanaan koordinasi di antara keduanya. Hal ini karena sudah tertanam mentalite bahwa sebuah koordinasi haruslah dilakukan secara tatap muka langsung antara kedua belah pihak. Selain itu koordinasi dengan tatap muka langsung menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri. Tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan koordinasi bukan karena fasilitas dan kemampuan yang terbatas melainkan karena ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika koordinasi dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Referensi

- Duff, A. S. (2002). The status of information society studies in the information science curriculum. *Library Review*, 51(3), 139-148. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/218333187?accountid=17242>
- Indonesia. (2007). *Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan*.
- Yeoman, I., & McMahon-Beattie, U. (2006). Tomorrow's tourist and the information society. *Journal of Vacation Marketing*, 12(3), 269-291. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/195799418?accountid=17242>.